

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan riil yang dihadapi, mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, mengembangkan berbagai skenario mengenai berbagai kemungkinan yang terjadi, mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan berbagai alternatif kebijakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara, maka keberadaan dan perannya sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.

© Kathleen (2001) menekankan pentingnya kerangka kerja strategis dan koordinasi dalam proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh lembaga perencana, sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi dalam pengembangan dan pemeliharaan kebijakan kerangka kerja strategis bagi organisasi, terkait dengan proses perencanaan anggaran yang secara sistematis merefleksikan, perilaku dan pendekatan lintas sektor;
- Bekerjasama lintas fungsi dalam organisasi untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mengatasi hambatan lintas-fungsi (misal: tanggungjawab bersama dan penyederhanaan proses);
- Meninjau ulang fokus riset dan aktivitas evaluasi lintas-organisasi untuk lebih menyelaraskan mereka dengan kebijakan kerangka kerja strategis;
- Memastikan fokus strategis yang kuat dalam proses pengajuan anggaran melalui proposal yang dihasilkan dari diskusi, pengembangan mekanisme yang lebih baik melalui pemantauan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program;
- Menyediakan keahlian dan diseminasi pengetahuan dalam kebijakan sosial dalam arti yang luas yang relevan dengan kegiatan organisasi;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



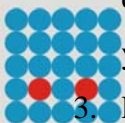
6. Membangun hubungan kemitraan yang erat, baik dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membangun kesepahaman atas kebijakan kerangka kerja strategis dan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Selaras dengan pendapat tersebut melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dalam Bab II, pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.1. Swasembada Daging Sapi Nasional sebagai Program Nasional

Swasembada daging sapi merupakan program pembangunan untuk sub sektor peternakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan PSDS 2014 diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa landasan hukum pelaksanaan swasembada daging sapi sebagai sebuah program pembangunan nasional antara lain adalah:

1. Bagian dari prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional sesuai Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (RPJMN 2010-2014);
2. Pengarahan Bapak Presiden RI kepada para Menteri dan Gubernur se-Indonesia dalam Rapat Kerja Program Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional, yang dilaksanakan tanggal 19-21 April 2010;
3. Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011, tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI 2011-2025) telah ditetapkan bahwa kegiatan ekonomi utama bidang peternakan difokuskan pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara;





4. *Blue Print* Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS 2014) yang diterbitkan berdasarkan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010, tentang Pedoman Umum Swasembada Daging Sapi 2014;

Dalam hubungan itu semua, tantangan mendasar yang timbul dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana menjaga konsistensi antara dasar negara sebagai falsafah bangsa dalam bernegara yang merupakan ‘pemersatu jiwa dan pikiran bangsa’ dengan pilihan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan antar keduanya dengan strategi, kebijakan, program, kegiatan-kegiatan, dan kinerja pembangunan (Bappenas, 2009).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk dilakukan penelitian, khususnya berkaitan pola pengorganisasian perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan menggunakan studi kasus program swasembada daging sapi nasional, agar dapat mendukung tercapainya amanat dalam UU SPPN khususnya pada Bab II, pasal 2, ayat (4), bagian (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

1.2 Tantangan yang Dihadapi

Pelaksanaan swasembada daging sapi nasional akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (1) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai sebuah proses; (2) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai sebuah sistem; dan (3) interkoneksi diantara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya.

Sebagai sebuah sistem yang harus berjalan berbasis pada multi pemangku kepentingan dan multi disiplin telah diantisipasi dalam RPJMN 2010-2014 maupun *Blue Print* PSDS 2014, dalam RPJMN 2010-2014 dinyatakan bahwa pelaksanaan program “Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam” merupakan tanggungjawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, antara lain adalah : (1) Menteri Pertanian; (2)



Menteri Pekerjaan Umum; (3) Menteri Komunikasi dan Informatika; (4) Menteri Perhubungan; (5) Menteri Perindustrian; (6) Menteri Keuangan; (7) Menteri Negara Riset dan Teknologi; (8) Menteri Kesehatan; (9) Menteri Negara Lingkungan Hidup; (10) Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; (11) Kepala Badan Pertanahan Nasional.

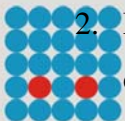
Keterkaitan dalam lintas kementerian, lembaga maupun antara pusat dan daerah juga dinyatakan dalam Blue Print PSDS 2014. Keberhasilan pencapaian swasembada daging sapi nasional memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain: (1) Kementerian Pertanian; (2) Kementerian Keuangan; (3) Kementerian Perdagangan; (4) Kementerian Perindustrian; (5) Kementerian Dalam Negeri; (6) Kementerian Koperasi dan UKM; (7) Kementerian Daerah Tertinggal; (8) Kementerian BUMN; (9) Kementerian Riset dan Teknologi; (10) Kementerian Pendidikan; (11) BATAN; (12) LIPI; (13) Perbankan; dan (14) 33 Propinsi yang terdiri dari 10 propinsi sebagai lokasi prioritas serta 13 propinsi sebagai lokasi pendukung.

Menjadi jelas bahwa dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program swasembada daging sapi nasional merupakan gambaran dari sebuah sistem yang kompleks dan dinamis yang harus dikelola dengan baik, agar dapat dicapai pola koordinasi lintas pemangku kepentingan menuju sinergi program dan anggaran untuk fokus dalam mencapai sasaran swasembada daging sapi nasional.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian rancang bangun model kelembagaan integrasi perencanaan pembangunan peternakan ini adalah:

1. Melakukan analisis situasional berkaitan dengan kondisi lingkungan pembangunan peternakan, khususnya berkaitan dengan pencapaian swasembada daging sapi;
2. Melakukan analisis kebijakan untuk menemukenali kesenjangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan upaya swasembada daging sapi;
3. Membangun model kelembagaan yang integratif dalam perencanaan pembangunan peternakan khususnya terkait dengan upaya pencapaian





swasembada daging sapi, meliputi pola pengorganisasian, penataan peran, dan pengukuran kinerja kelembagaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Model kelembagaan yang integratif dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya terkait dengan upaya pencapaian swasembada daging sapi yang dihasilkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pemangku kepentingan antara lain:

1. Bagi Kementerian PPN/Bappenas:

- Diperoleh metode yang efektif dalam pola pengorganisasian proses perencanaan pembangunan nasional;
- Diperoleh kerangka pikir dan alur proses perencanaan pembangunan dan disertai dengan peran dan fungsi yang harus dilakukan dalam konteks *intra-organization* maupun *inter-organization*;

2. Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:

- Diperoleh kerangka pikir dan alur proses perencanaan pembangunan dengan peran, fungsi dan pengaruh terhadap tercapainya efektivitas proses perencanaan pembangunan;
- Teridentifikasinya faktor-faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan pembangunan, dan inisiatif strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ;

3. Bagi kalangan Perguruan Tinggi dan masyarakat ilmiah:

- Adanya referensi yang dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat (*causal-link*) secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan pembangunan nasional;
- Adanya referensi baru berupa penelitian kebijakan dengan metode, sistem pakar dan *soft system methodology*, khususnya dalam bidang penelitian proses perencanaan pembangunan nasional;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi kebaruan dalam bentuk, antara lain:

1. Rumusan atau desain model kelembagaan integrasi perencanaan pembangunan nasional yang efektif, meningkatkan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maupun sinkronisasi antarsektor pembangunan;
2. Teridentifikasinya faktor dominan yang melibatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan;
3. Model kelembagaan terintegrasi dalam pengorganisasian perencanaan pembangunan swasembada daging sapi, dengan penjabaran kerangka kerja pada tingkat kelembagaan (strategik) dan taktikal-operasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.